

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polres Kulonprogo)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh:

FARADILLAH WIDYASINTA RAKHMAWATI

NIM C. 100.130.123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polres Kulonprogo)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

FARADILLAH WIDYASINTA RAKHMAWATI
NIM C. 100.130.123

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Subakti', is written over a light gray rectangular background.

Dr. Natangsa Subakti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Polres Kulonprogo)

Oleh :

FARADILLAH WIDYASINTA RAKHMAWATI
NIM C. 100.130.123

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 10 Maret 2020

Dewan Penguji :

Dewan Penguji Skripsi

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Sudaryono, S.H., M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Muchamad Iksan, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H. M.Hum.)
NIK. 537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Juli 2020

Penulis



Faradillah Widyasinta Rakhmawati

C100130123

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Polres Kulonprogo)

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu fenomena pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia, tak terkecuali oleh anak-anak. Penanganan dalam pelanggaran lalu lintas itu sendiri, salah satunya telah diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, pada dasarnya merupakan tanggungjawab dari berbagai macam pihak tak terkecuali orang tua dan polisi lalu lintas. Sehingga dalam usaha untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, diperlukan banyak kajian khusus dan salah satunya kajian yang tepat yakni menggunakan disiplin ilmu kriminologi. Kemudian di antara banyak daerah di Indonesia, Kabupaten Kulonprogo merupakan kabupaten yang memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas oleh anak dengan angka cukup tinggi. Peran aktif sangat diperlukan polisi lalu lintas dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kulonprogo, agar permasalahan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat berkurang drastis, yakni salah satunya dengan cara melakukan upaya hukum baik itu secara persuasif, preventif, maupun represif.

Kata Kunci: Pelanggaran hukum, lalu lintas, anak, kriminologi.

Abstract

Traffic violation is one of the most frequent violation phenomena in Indonesia, not excluded by children. Handling in the traffic violation itself, one of which has been regulated by Constitution of Law number 22 year 2009, about Traffic and Road Transportation. The high number of traffic violations committed by children, is basically the responsibility of various parties including the parents and traffic police. So, in an effort to reduce the level of traffic violations, it takes a lot of special studies and one of them is the right study that is using the discipline of criminology science. Then among the many regions in Indonesia, Kulonprogo Regency is a district that has a high level of traffic violations by children. Therefore, the active role of the traffic police from the Kulonprogo of Police Traffic Unit, so that traffic problems can be drastically reduced, one of them by doing a good legal effort that is persuasive, preventive, and repressive

Keywords: Violation of law, traffic, child, criminology.

1. PENDAHULUAN

Membahas mengenai terjadinya pelanggaran lalu lintas tentu tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, melainkan juga terjadi di kota-kota kecil. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat (Wirjono Prodjodikoro, 2003). Permasalahan pelanggaran lalu lintas menjadi begitu

kompleks karena tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, melainkan juga melibatkan anak-anak di bawah umur.

Dengan adanya peran polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum, mempunyai peranan penting untuk menciptakan tatanan lalu lintas yang baik dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu polisi lalu lintas juga memiliki fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi) (Soerjono Soekanto, 1989).

Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, salah satunya berasal dari peran orang tua. Orang tua merupakan salah satu pihak yang sering berinteraksi secara langsung dengan anak, maka tidaklah seharusnya membiarkan anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Kabupaten Kulonprogo, dalam hal ini menjadi salah satu kabupaten yang cukup tinggi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Karena itu cukuplah menarik untuk membahas tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kabupaten Kulonprogo.

Setelah memaparkan uraian di atas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dijelaskan yakni; (1) Bagaimana profil peraturan hukum tentang pelanggaran lalu lintas; (2) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak; dan (3) Upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memperjelas mengenai tinjauan dari segi keilmuan kriminologis mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Ditambah lagi dengan peran Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam menangani suatu perkara kecelakaan lalu lintas beserta kendala yang dihadapi jajaran Satlantas Polres Kulonprogo.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni dapat memberikan pengetahuan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, ditinjau dari segi keilmuan kriminologis pada khususnya, dan dari segi hukum pidana pada umumnya. Kemudian penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh anak.

2. METODE

Untuk jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian hukum yang bersifat melukiskan atau dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat menjelajah. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*, yakni mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian dihubungkan dengan realita yang terjadi dalam masyarakat (Hilman Hadikusuma, 1995).

Kemudian untuk metode pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004). Metode analisis data penelitian ini adalah analisis data *kualitatif*, yakni analisis yang tidak harus dilakukan dengan lokasi yang luas, dengan responden yang banyak, dan dengan keterangan yang banyak (Hilman Hadikusuma, 1995 : 99)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Peraturan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

3.1.1 Dasar Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penjatuhan hukuman, taraf beratnya hukuman bagi tindak pidana pelanggaran tidak seberat jika dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan. Pelanggaran itupun dapat dikategorikan kembali menjadi dua kriteria, yakni secara kualitatif dan kuantitatif. Moeljatno (dalam Tri Andrisman, 2007:89) menjelaskan; pelanggaran merupakan *wetsdelict* yang artinya yaitu; perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik. Adapun pendapat lain yakni menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari perbuatan melawan hukum (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 33).

Pelanggaran jika dilihat secara khusus dari sudut pandang lalu lintas, maka secara bahasa hukum dapat disebut menjadi pelanggaran lalu lintas. Aturan hukumnya kemudian diatur lebih lengkap melalui Undang-Undang No. 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain dari KUHP dan KUHAP. Menurut Kepala Bidang Operasional Satlantas Polres Kulonprogo yaitu Iptu Basuki Rakhmat, yang menjadi payung hukum dalam menjalankan tugas adalah: (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP; dalam Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, Pasal 211-216 KUHAP; (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (4) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan. Selanjutnya yaitu: (5) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan; Kemudian: (6) Surat Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kapolri, Tanggal 19 Juni Tahun 1993, Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu; (7) SEMA No. 22 Tahun 1983 Tentang Pidana Denda Dalam Perkara Cepat Harus Segera Dilunasi; (8) SEMA No. 4 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu; (9) SEMA No. 3 Tahun 1989 Tentang Pidana Kurungan Dalam Perkara Lalu Lintas. (10) Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Rakhmat).

Dari keseluruhan kumpulan peraturan hukum yang dipergunakan oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia tak terkecuali oleh Satlantas Polres Kulonprogo, maka dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut adalah payung hukum bagi aturan lalu lintas di Indonesia.

3.1.2 Uraian Terhadap Dasar Hukum Yang Digunakan Satlantas Polres Kulonprogo Dalam Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Dasar atau landasan yang dipergunakan oleh Satlantas Polres Kulonprogo, selanjutnya akan dijelaskan mengenai posisi dan jenis pelanggaran lalu lintas yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal yang dipergunakan dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas di Wilayah Polres Kulonprogo diantaranya adalah; Pasal 274 sampai dengan Pasal 303 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.1.3 Implementasi Dasar Hukum Yang Digunakan Satlantas Polres Kulonprogo Dalam Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Dikarenakan pelanggaran lalu lintas termasuk golongan tindak pidana ringan, maka prosesnya juga dilakukan dengan hukum acara dengan pemeriksaan acara cepat. Biasanya para pelanggar cukup dengan melakukan suatu pembayaran ganti rugi kepada negara melalui bank, atau biasa disebut denda atas pelanggaran lalu lintas sesuai kesalahan yang dilakukan. Jika dahulu sebelum adanya PERMA No. 12 Tahun 2016 proses pembayaran dilakukan di Pengadilan setelah sidang, maka setelah adanya PERMA tersebut, pembayaran denda dapat dilakukan kepada jaksa yang bertugas selaku eksekutor melalui Kantor Kejaksaan Negeri.

Kemudian menurut penjelasan Bripka Thanov Fajar Jaya Saputra, selaku Bintara tilang yang selalu turun di lapangan guna melakukan penegekan aturan terhadap pelanggaran lalu lintas, dirinya juga menambahkan bahwa:

“Banyak di antara para pelanggar lalu lintas yang masih di bawah umur itu biasanya masih duduk dibangku SMP-SMA, jadi sebagian yang memang masih di bawah umur 18 tahun, sudah berani membawa kendaraan bermotor di jalan raya. Walaupun berkendara mereka memang sudah bisa, namun aturan hukum belum mengizinkan mereka untuk memiliki SIM. Jadi dengan kata lain, status mereka belum boleh mengendarai kendaraan bermotor sendiri”.(Saputra)

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

3.2.1 Faktor Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

Menurut Iptu Basuki Rakhmat, faktor yang sering terjadi dan menjadi alasan bagi anak selaku pelanggar jika dilihat dari aturan perundang-undangan, yaitu: (1) Denda yang kurang maksimal; yaitu seperti contohnya di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Pasal 285, disebutkan denda untuk pelanggar yang tidak melengkapi kelengkapan kendaraan bermotornya, seperti klakson, spion, tidak menyalakan lampu utama, mengubah warna lampu dll, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00. Kemudian, (2) Proses hukum yang mudah; yaitu seperti ketika tertilang pada saat melanggar, pelanggar dapat membayar denda melalui bank, kemudian dapat membawa kembali surat-surat berkendaranya, tanpa perlu repot-repot ke Kantor

Kejaksaan Negeri untuk membayarkan dendanya. dan (3) Kurangnya jumlah aparat penegak hukum; hal ini mengakibatkan pelanggar hanya takut dan taat kepada peraturan jika ada aparat penegak hukum saja. Jika tidak ada polisi selaku aparat penegak hukum maka aturan tersebut sudah pasti tidak ada harganya. Hal ini bisa diamati melalui kamera CCTV di persimpangan jalan pada saat malam hari (Rakhmat).

3.2.2 Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai pola perilaku anak dalam berkendara menggunakan kendaraan bermotor dan sering melanggar aturan lalu lintas, perlu adanya suatu kajian dari sudut pandang kriminologi. Hal ini dikarenakan kriminologi merupakan sebuah cabang ilmu hukum pidana yang mengkaji lebih dalam mengenai perilaku seseorang, baik secara *intrinsik* maupun *ekstrinsik*, mengenai mengapa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Dalam cabang disiplin ilmu kriminologi pada umumnya tidaklah diuraikan mengenai suatu bentuk teori mengenai perilaku seseorang yang melakukan pelanggaran hukum melainkan melakukan suatu kejahatan. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap peraturan juga bisa dikatakan telah melakukan suatu tindak kejahatan yang sifatnya ringan. Adapun menurut Cesare Lombroso (1835-1909) yang merupakan seorang dokter, yang menjabat sebagai ahli kedokteran kehamikan, dirinya menjelaskan bahwa bakat atas kejahatan itu dibagi menjadi 4 pokok, yaitu; (1) Penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat; (2) Bakat jahat itu diperoleh karena kelahirannya (*born criminal*); (3) Bakat jahat tersebut dapat dilihat melalui ciri-ciri biologis tertentu; dan (4) Bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi (Susanto, 2011 : 48-49).

3.2.3 Teori Sosio-Kultural Sebagai Penunjang Ilmu Kriminologi Dalam Menganalisa Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

Teori yang menyinggung mengenai sebab-akibat dalam hal ini juga pernah dikemukakan oleh filsuf asal Amerika yakni A. K. Cohen. Dalam bukunya *Delinquent Boys* (1955), Cohen mencari tahu dan menjelaskan mengenai sebab-akibat kenakalan remaja dari perbedaan kelas antara anak-anak yang diperolehnya

dalam keluarganya (Susanto, 2011). Cohen juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan jiwa seorang anak yang berasal dari keluarga kelas menengah dan kelas pekerja, terjadi suatu ketidakseimbangan mental dalam diri anak di keluarga tersebut.

Teori yang terakhir yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan ilmu kriminologi, yakni tentang teori *labeling*. Tokoh yang menganut dan mengembangkan mengenai teori *labeling* diantaranya adalah Becker. Becker (dalam Maghdalena Todingrara, 2013 : 25) menyebutkan “Kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu”.

Kemudian menurut Frank Tannenbaum, dirinya “Memandang proses kriminalisasi sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), memencilkan, menguraikan, menekankan/menitikberatkan, membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat” Becker (dalam Maghdalena Todingrara, 2013).

Menurut hemat penulis, teori *labeling* ini sangat tepat jika dikaitkan dengan pola perilaku anak yang dalam berlalu lintas, baik itu yang pernah tertangkap ataupun yang selalu lepas dari kejaran polisi lalu lintas. Pemberian *label* atau cap yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, biasanya akan selalu mengarah kepada para anak atau remaja yang memiliki perilaku menyimpang dalam berkendara.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

3.3.1 Jenis Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Soedjono (dalam Maghdalena Todingrara, 2013 : 30) berpendapat bahwa seorang pakar pidana fokus membahas mengenai perilaku berlalu lintas, dirinya menjelaskan bahwasanya untuk menangani suatu pelanggaran lalu lintas perlu ada upaya penanggulangan agar tidak mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas. Dirinya menjelaskan bahwa semua ini dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi khususnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

A. S. Alam dan Amir Ilyas (2010 : 79-80) menyebutkan ada 3 macam cara atau upaya penanggulangan yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni polisi lalu lintas untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas agar dapat menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Adapun jenis dan cara tersebut di antaranya;

1) Upaya *Pre-Emtif*

Yang dimaksud upaya *pre-emptif* di sini ialah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana termasuk di dalamnya adalah pelanggaran lalu lintas.

2) Upaya Preventif (Pencegahan)

Dalam hal ini upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas dalam hukum.

3) Upaya Represif (Penindakan)

Menurut A. S. Alam dan Amir Ilyas, upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

3.3.2 Bentuk Upaya dan Kegiatan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Oleh Satlantas Polres Kulonprogo

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kulonprogo, telah banyak upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan oleh anak. Adapun semua kegiatan upaya penanggulangan tersebut setiap tahunnya didata dalam sebuah laporan tahunan, yang merupakan kesatuan daripada laporan bulanan Satlantas Polres Kulonprogo yang dilakukan pada bulan April dan Juni 2016, yang berupa:

Tabel 1. Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kulonprogo, D.I. Yogyakarta (Bulan April 2016)

Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kulonprogo, D.I. Yogyakarta (Bulan April 2016)		
Sasaran: Siswa atau Pelajar dari jenjang TK hingga SMA Sederajat		
No	Bentuk dan Sasaran Kegiatan	Waktu
1	Melaksanakan PSA dan Camejasa di TK Kemala Bahayangkari yang diikuti oleh 30 siswa dan 2 orang guru pendamping.	Senin tanggal 4 April 2016 pukul 08.30 s/d 10.00
2	Melaksanakan PSA dan Camejasa di TK ABA Dukuh yang diikuti oleh 50 siswa dan 3 orang guru pendamping	Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 08.00 s/d 09.30
3	Melaksanakan Gebyar PAUD, PSA dan Camejasa di Kecamatan Samigaluh yang diikuti oleh 250 anak-anak PAUD	Sabtu tanggal 9 April 2016 pukul 08.00 s/d 11.00
4	Melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas dan sebagai pembina upacara di SMP N 5 Wates	Senin tanggal 11 April 2016 pukul 07.00 s/d 08.00
5	Melaksanakan PSA dan Camejasa di TK Ibnu Mas'ud yang diikuti oleh 60 siswa dan 4 orang guru pendamping	Selasa tanggal 12 April 2016 pukul 08.30 s/d 10.00
6	Melaksanakan PSA dan Camejasa di TK Masyitoh Kedungsari Pengasih yang diikuti oleh 40 siswa dan 2 guru pendamping	Rabu tanggal 20 April 2016 pukul 08.00 s/d 10.00
7	Melaksanakan PSA dan Camejasa di TK ABA Sempu Lendah yang diikuti oleh 100 siswa dan 4 guru pendamping	Kamis tanggal 21 April 2016 pukul 08.00 s/d 10.00
8	Melaksanakan PSA dan Camejasa di TK Tunas Sari Kopat yang diikuti oleh 50 siswa dan 3 orang guru pendamping	Senin tanggal 25 April 2016 pukul 08.30 s/d 10.00
9	Melaksanakan pelatihan PKS di SMP N 2 Kalibawang dengan materi etika tertib berlalu lintas	Selasa tanggal 26 April 2016 pukul 08.30 s/d 11.00
10	Melaksanakan pelatihan PKS di SMP N 2 Kalibawang dengan materi 12 gerakan pengaturan lalu lintas	Rabu tanggal 27 April 2016 pukul 08.00 s/d 11.00

** Data Satlantas Polres Kulonprogo, Unit Pendidikan Pendidikan dan Rekayasa, Bagian Pendidikan Masyarakat Dalam Lalu Lintas (Pada Bulan April 2016)*

3.3.3 Manfaat Dari Kegiatan Penanggulangan Pelanggaran lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Oleh Satlantas Polres Kulonprogo

Menurut Kanit DikYasa Satlantas Polres Kulonprogo, yaitu Ipda Triatmi Novi Artuti, S.Sos., dirinya mengatakan bahwa:

“Dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas, lebih baik dimulai sejak usia dini. Dengan membentuk Polisi cilik untuk anak TK dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di tingkat SD-SMA, maka akan mempermudah tugas daripada Satlantas Polres Kulonprogo pada saat mengatur jalannya lalu lintas khususnya pada saat pagi hari dan pada jam pulang sekolah.”(Artuti)

Menurut Ipda Triatmi Satlantas Polres Kulonprogo dalam hal ini lebih mudah dan nyaman dengan konsep penyuluhan menggunakan upaya preventif. Ia juga mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya anak-anak itu masih memiliki sifat penasaran yang tinggi. Apa yang anak-anak ingat dalam otaknya ketika ia masih kecil, pada dasarnya jika ia telah mengunci apa yang ia dapat, sampai tua sekalipun pelajaran-pelajaran dasar dalam berlalu lintas akan teringat terus”. (Artuti)

Maka dari itu, Satlantas Polres Kulonprogo sering melakukan penyuluhan dengan konsep upaya preventif. Ipda Triatmi juga mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya anak-anak itu masih memiliki sifat penasaran yang tinggi. Apa yang anak ingat dalam otaknya ketika ia masih kecil, pada dasarnya jika ia telah mengunci apa yang ia dapat, sampai tua sekalipun pelajaran-pelajaran dasar dalam berlalu lintas akan teringat terus”. (Artuti)

Menurutnya, seorang anak yang dirasa mampu secara fisik dan kasat mata dirinya mahir mengendarai kendaraan bermotor, pada dasarnya secara psikis dirinya belum mampu mengontrol emosinya ketika berada di jalan. Hal inilah yang

mengakibatkan seorang anak akan merasa semakin terpacu meningkatkan kecepatannya kendaraannya, ketika ia merasa dirinya tersaingi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, bahwa profil peraturan hukum tentang pelanggaran lalu lintas pada dasarnya sudah cukup baik dalam menciptakan sebuah tatanan hukum dalam berlalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Kulonprogo. Dengan banyaknya produk hukum yang berlaku dan ditinjau dari sudut pandang hukum positif, menandakan Polri sudah siap dalam menyediakan suatu pelayanan terbaik dalam berlalu lintas.

Kedua, faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak jika dikaji dengan tinjauan kriminologi, pada mulanya dapat disimpulkan bahwa hal ini disebabkan oleh kesalahan orangtua dalam memperlakukan anaknya, sehingga anaknya bisa bebas mengendarai kendaraan bermotor.

Ketiga, jajaran Satlantas Polres Kulonprogo dengan berbagai macam upaya pencegahan sudah banyak dilakukan, mulai dari sistem jemput bola; yakni mendatangi berbagai macam sekolah untuk melakukan penyuluhan hingga melakukan upaya represif dengan cara melakukan operasi tilang.

Saran

Pertama, untuk jajaran Satlantas Polres Kulonprogo khususnya Unit Pendidikan Masyarakat, terkait masalah peraturan hukum yang dipergunakan alangkah baiknya jika lebih sering disosialisasikan melalui berbagai macam media agar masyarakat Kulonprogo dapat mengerti akan hukuman apabila melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kedua, untuk Satlantas Polres Kulonprogo Unit Pendidikan Masyarakat, dalam hal ini perlu mengadakan kajian-kajian hukum secara mendalam terhadap peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas agar lebih efektif mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Ketiga, untuk Satlantas Polres Kulonprogo Unit Pendidikan Masyarakat dalam mensosialisasikan aturan lalu-lintas, alangkah baiknya juga merangkul para orang tua di wilayah Kulonprogo karena orangtua lah yang pertama bertanggungjawab apabila anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas.

PERSANTUNAN

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan berkontribusi yang di antaranya: Kedua orangtua; Dosen pembimbing; Jajaran Polres Kulonprogo; dan semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga karya tulis ini sekiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrisman, Tri, 2007. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Soekanto, Soerjono, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Susanto, I. S., 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing

Zainal Asikin, dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 22 Tahun 1983 Tentang Pidana Denda Dalam Perkara Cepat Harus Segera Dilunasi

Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Jurnal Ilmiah

Maghdalena Todingrara, “*Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)*”, (e-Journal) Repository Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, (2013)